

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengalaman berpariwisata telah menjadi fokus para pemerhati pariwisata, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan praktisi, pada dasarnya wisatawan tergerak untuk menentukan tujuan destinasi wisata yang di dorong oleh nilai, dan destinasi itu sendiri menjadi nilai bagi wisatawan itu sendiri. Nilai-nilai yang dirasakan wisatawan merupakan instrumen yang strategis sebagai sasaran pengelola guna mencapai keunggulan kompetitif bagi organisasi atau manajemen organisasi, kelebihan yang diberikan dalam dunia pariwisata bagi wisatawan adalah membuat pengalaman yang bernilai luhur (Arida, 2017), yaitu menciptakan pengalaman perjalanan wisata yang berkesan dan unik sehingga dapat memunculkan persepsi kepuasan wisata bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Undang-undang otonomi daerah dalam berjalannya roda pemerintahan menjadi sorotan langsung hingga detik ini, undang-undang yang sedang berlangsung ini dilaksanakan di daerah administrasi pemerintahan agar dapat menciptakan pelayanan yang optimal kepada warga negara dan mendorong setiap daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Penetapan UU No. 23 tahun 2014 yang berbunyi pemerintah daerah yang menekankan pada hak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Otonomi daerah di siasati dengan tujuan memberi kewenangan penuh kepada setiap daerah untuk bisa mengatur dan mengurus daerah administrasinya, guna memberikan

pelayanan yang efisien dan optimal pada penyelenggara roda pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat yang ideal.

Menurut UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwasannya pariwisata merupakan dari rangkaian kegiatan dan didukung langsung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang bisa di rasakan langsung oleh masyarakat di era industri 4.0 ini, aktivitas pada wisata bukan hanya dijadikan sebagai keinginan akan tetapi sudah semestinya menjadi salah satu kebutuhan primer manusia. Menurut (Lumanauw, 2020) hakikatnya tujuan dari terciptanya wisatawan seluruh mancanegara yakni melakukan perjalanan untuk rekreasi. Kegiatan dari pariwisata merupakan bagian dari kebutuhan mendasar manusia yang terkhusus di dominasi oleh generasi milenial dan generasi dibawahnya yaitu generasi Z di dunia, terkhusus pada Indonesia (Lumanauw, 2020). Meskipun demikian dengan adanya pariwisata sering kali dikaitkan dengan ekonomi dan industri kreatif karena pada pertumbuhan suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Indonesia pada saat ini telah berupaya membangun akselerasi dari pertumbuhan ekonomi pariwisata yang memiliki 14 jenis industri sebagai kategori kreatifitas yang menumbuhkan sumber mata pencarian masyarakat Indonesia diantaranya periklanan, film, kuliner, arsitektur, foto/videografi, pasar seni budaya, fashion, kerajinan, desain, permainan interaktif, webdesain, seni pertunjukan, penerbitan & percetakan, serta riset dan pengembangan,

Krisis kesehatan yang melanda di seluruh dunia dengan munculnya wabah *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), telah membuat peradaban di dunia terhenti seketika, berbagai masalah muncul pada roda perekonomian negara yang

mengalami adanya keretakan pada laju pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah berupaya untuk dapat menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadinya *collapse* pada suatu negara, bahkan hal yang sifatnya masih dalam pengembangan turut kena dari dampak ini, yaitu sektor pariwisata, pengendalian yang cepat dan tepat untuk dapat memutus rantai penyebaran virus, pemerintah dengan *treatmentnya* mengkampanyekan protokol kesehatan, dengan kata lain demi menjaga keselamatan wisatawan yang akan berkunjung ke berbagai daerah. Pada hasil survei yang telah dilakukan pada peneliti sebelumnya tepatnya di desa wisata institute, memperoleh hasil 97 desa wisata dari penjuru negeri Indonesia tercatat sekitar 90 destinasi dan desa wisata yang terdampak dari adanya wabah ini baik pengelola wisata maupun wisatawan (Setyaningrum Nugraheni et al., 2020). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /MENKES/382/2020 telah menerbitkan keputusan protokol kesehatan bagi ruang publik dan pelayanan umum dalam rangka memutus rantai penyebaran dan pengendalian covid-19. Ketetapan yang telah diputuskan tersebut menjadi acuan protokol kesehatan pada seluruh lokasi yang menjadi daya tarik wisata atau destinasi wisata. Kehidupan baru yang bisa dirasakan saat ini atau orang lain menyebutnya *new normal* tengah menjadi rancangan pemerintah guna menanggulangi perekonomian akibat wabah covid-19, telah menjadi fokus khusus perbincangan di kalangan masyarakat. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pernah mengatakan pada saat krisis kesehatan ini harus bersiap segala hal dalam menghadapi *new normal* untuk dapat hidup berdampingan dengan covid-19.

Penyebaran covid-19 tidak hanya di kota-kota besar lainnya saja, terkhusus pada daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi daerah tiga terbesar setelah Jakarta & Bali dalam kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara yang sangat rentan terhadap penularannya yang membuat keamanan dan ketentraman dalam berwisata memiliki pengaruh yang kuat terhadap minat berwisata (Arlinda et al., 2021), bahwa didalam industri pariwisata terdapat tiga aspek dalam pemahamannya yang sangat dijadikan acuan yaitu Keamanan (*Safety*), keselamatan (*Security*), dan kepastian (*surety*).

Tabel 1 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Sleman.

URAIAN	TAHUN									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
REALISASI (jiwa)	5.075.315	248.370	7.038.207	238.488	8.224.033	307.705	10.145.104	233.014	4.226.075	24.044
JUMLAH REALISASI (jiwa)	5.323.685		7.276.695		8.531.738		10.378.118		4.250.119	
Persentase (Nus-Manc) (%)	95,33	4,67	96,72	3,28	96,39	3,61	97,75	2,25	99,43	0,57
Kontribusi thd PDRB Hb (%)	10,22		10,29		10,16		10,36		8,84	

Sumber: BPS 2021, Dinas Pariwisata 2021

Berdasarkan data tabel yang di peroleh dari Dinas Pariwisata melalui (BPS Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman) mencatatkan bahwa Kabupaten Sleman pada kunjungan wisatawan di tahun 2018 sebanyak 8.531.738 juta wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Sleman baik lokal maupun mancanegara. Pencapaian ini mendapat peroleh hasil yang lebih dari yang ditargetkan sebelumnya. Namun disisi lain pada tahun berikutnya berbanding kebalik, berdasarkan klasifikasi destinasi pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata alam mencatat penurunan sebanyak 1.726.167 orang dari tahun 2019 sebanyak 3110.452 orang, kunjungan wisata budaya juga menurun menjadi 1.134.075 orang, sedangkan jumlah kunjungan ke

tempat Wisata buatan meningkat dari tahun 2019 sebesar 987.074 orang menjadi 1.389.877 orang, data diatas diambil pada peraturan Bupati (No.31/Tahun 2021/RKPD/Kabupaten Sleman/Tahun2022). Data wisatawan yang tertera pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman, menunjukkan rendahnya tingkat pada kunjungan daerah dalam daya tarik wisata, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang berat dalam menciptakan inovasi melalui perencanaan yang menyeluruh bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

Melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman NOMOR 11 Tahun 2015 tentang rencana induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Melihat dari PERDA tersebut, adanya fokus yang dituju oleh PEMDA Sleman, alasan utamanya adalah dengan terbitnya PERDA tersebut dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sleman menuju *Smart City* 2021, maka pariwisata di Kabupaten Sleman menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai pemasukan murni dari adanya destinasi wisata. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang berhubungan langsung dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang rencana induk pengembangan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Kedua pihak antara pemerintah dan pengelola destinasi pariwisata dapat mendukung dan memberikan akses mudah kepada kontingen yang menyangkut paut dengan kepariwisataan (Yogyakarta, 2021), hal ini demi terciptanya pariwisata

berkembang dan optimal sehingga nilai-nilai luhur, budaya religi dan karakter Kabupaten Sleman dapat terwujud dengan baik.

Maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menerbitkan buku panduan serta program sertifikasi pariwisata yang telah berjalan pada beberapa tempat destinasi pariwisata di Kabupaten Sleman agar dapat menerapkan protokol kesehatan dengan berbasis CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) hal tersebut agar selaras dengan himbauan Pemerintah dan KEMENKES(Jogja, 2021), akan tetapi dari berjalannya program ini menurut data Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman per-September 2021 masih belum banyak destinasi yang terferifikasi CHSE, setidaknya ada 146 objek destinasi wisata dan baru 15 yang tersertifikasi untuk mulai dilakukan uji coba (Detik.com 2021), teruntuk objek wisata lainnya sedang dalam proses pengurusan. Para pengelola tempat wisata sudah banyak yang sadar akan dari program CHSE ini, melihat standar yang diterapkan membuat wisatawan semakin yakin akan berkunjung ketempat yang sudah legalitasnya jelas (Lumanauw, 2020), Seperti dua destinasi wisata Sleman yang sudah mendapatkan sertifikat CHSE lebih dulu yaitu, Candi Ratu Boko, & Tebing Breksi, kedua pariwisata ini menjadikan bahan contoh utama bagi penerapan CHSE dilingkungan wisata Sleman, karena dari kedua ODTW tersebut tidak hanya dari segi kesiapannya saja tetapi mampu dengan cepat secara akselerasi dan tanggap dalam keadaan situasi kondisi yang tidak menentu seperti pandemi covid-19 pada melihat antusias pengelola pariwisata yang masih terkendala terhadap pemenuhan kuota setiap daerah yang berjumlah hingga ratusan destinasi dan objek (Sunnaholomi, 2020), kepala Dinas Pariwisata D.I.Y Singgih Raharjo menyebutkan bahwa kuota

D.I.Yogyakarta dalam pemenuhan kuota sertifikat CHSE sekitar 250 untuk tahun 2021, rincian dari kuota 250 tersebut diantara lain sekitar 200 kuota untuk hotel dan restoran. Selanjutnya 40 sertifikat lainnya terbagi untuk objek wisata di 4 Kabupaten dan Kota Jogjakarta.

Kasus bencana yang sering terjadi di Indonesia tiada lain merupakan dari faktor alam itu sendiri, namun melihat kondisi yang sangat berbeda dari biasanya membuat diri kita menjadi lebih waspada dari sebelumnya pada covid-19 ini. Hadirnya bencana memang tidak dapat diprediksi dengan akurat oleh manusia, dalam penelitian terdahulu mengatakan bencana datang dengan wujud dan intensitas yang berbeda (zaenuri Muchammad, 2012), kasus covid-19 Yang merebak hingga penjuru negeri membuat beberapa sektor pariwisata harus memutar otak untuk dapat mengisi kekosongan ruang kendali dalam pengelolaan pariwisata agar tidak terjadinya penularan yang masif di lingkungan wisata

Berbagai upaya Pemda Sleman dalam meminimalisir hal tersebut sudah dilakukan dengan cara menutup tempat destinasi wisata yang berpotensi menimbulkan kerumunan dengan melihat kelonjakan kasus covid-19 di Kabupaten Sleman yang semakin meningkat melalui wisatawan dan faktor lainnya, penutupan tersebut sesuai dengan surat edar yang sudah di tetapkan Bupati Sleman dengan waktu yang ditentukan(Awan, 2021), karena perihal dunia pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dapat memunculkan permasalahan baru dengan menciptakan kerumunan yang membuat cluster baru bertambah (Suprihatin, 2020), hasil dari kebijakan ini membuat PEMDA Sleman khususnya Dinas Pariwisata berupaya

untuk mendorong pengelola destinasi wisata dari adanya penerapan CHSE ini sebagai langkah yang tepat dalam pemulihan pariwisata Selaman.

Protokol kesehatan yang telah di terapkan sebelum adanya program CHSE ini ialah, pengecekan suhu sebelum memasuki gerbang destinasi wisata, mewajibkan bagi wisatawan untuk menggunakan masker dan dihimbau untuk menjaga jarak, serta peringatan lainnya yang harus wajib diikuti wisatawan. Sertifikasi CHSE meliputi dari beberapa proses pemberian legalitas terhadap standar protokol kesehatan kepada pengelola destinasi pariwisata dan kontingen lainnya yang menyangkut paut dengan pariwisata seperti perhotelan & *homestay*, pada hasil riset sebelumnya menunjukkan bahwa adanya kekhawatiran akan rentannya terpapar yang membuat wisatawan nusantara dan mancanegara merencanakan ulang perjalanannya. penerapan protokol kesehatan yang ketat sangat di perlukan guna menciptakan kepercayaan dari wisatawan di tengah kondisi krisis kesehatan dan kebutuhan akan berwisata (Lim et al., 2021). Memberikan pelayanan rasa aman dan nyaman pada saat mengunjungi tempat destinasi wisata merupakan bentuk peduli pemerintah dalam menanggulangi resiko penularan covid 19 di sektor pariwisata, maka hadirnya program CHSE ini sebagai solusi wisatawan untuk lebih bijak dan peduli demi memutus rantai penyebaran virus dengan diterapkannya program tersebut (M. M. Utami & Pertiwi, 2021).

Pariwisata di Kabupaten Sleman pada saat PPKM Jawa-Bali memang cukup sulit untuk dapat bertahan dari adanya penerapan ini, langkah demi langkah dilakukan sebagai upaya dalam menuntaskan pada permasalahan yang ada, pada keputusan yang disampaikan pada rapat koordinasi evaluasi PPKM level 3 Jawa-

Bali, objek daya tarik wisata (ODTW) Kabupaten Sleman terdapat dua destinasi wisata yang sudah memiliki sertifikasi CHSE sebagai bahan percontohan pada uji coba pembukaan tempat wisata secara terbatas di masa PPKM, destinasi tersebut ialah Candi Ratu Boko & Tebing Breksi (Yesaya, 2021), Bupati Sleman Kustini Sri yang diakses pada (Tribun Jogja, 2021) mengatakan bahwasannya hal ini selaras dengan target capaian Pemkab Sleman yang dimana pada beberapa terakhir ini di fokuskan untuk persiapan skenario pembukaan objek wisata, yang nantinya jika program percontohan ini dapat berjalan dengan sukses dan level PPKM bisa turun ke-level yang terendah, sehingga objek wisata lainnya akan bisa segera dibuka dan dinikmati oleh wisatawan, hal ini perlu ditingkatkan pada kedisiplinan dari adanya CHSE ini agar berjalan optimal serta meminimalisir dari adanya penularan yang masif.

Berdasarkan uraian diatas perlu dikaji lebih mendalam proses dari penerapan CHSE di sektor pariwisata Kabupaten Sleman, dengan cara mengkomparasi serta mengambil lokasi pada dua destinasi wisata yaitu Tebing Breksi & Candi Ratu Boko yang merupakan destinasi percontohan penerapan CHSE di Kabupaten Sleman.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah pada proposal penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi & Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pada penerapan CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment Sustainability*) pada objek destinasi wisata

Tebing Breksi dan Ratu Boko dalam meminimalisir penyebaran virus covid-19 di sektor pariwisata Kabupaten Sleman?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses berjalannya dari implementasi kebijakan CHSE di Kabupaten Sleman pada sektor pariwisata dengan objek daya tarik wisata Tebing Breksi & Ratu Boko dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 melalui program CHSE.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang di timbulkan dari adanya penerapan CHSE Pada kedua objek wisata Tebing Breksi dan Ratu Boko.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi bagi pengembangan ilmu sosial terutama Program Studi Ilmu Pemerintahan tentang analisa dampak pandemi covid-19 di sektor pariwisata, terutama pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini harapannya dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. Dan dijadikan bahan evaluasi untuk Pemerintah Kabupaten Sleman terkhusus Dinas Pariwisata Sleman.

1.5. Tinjauan Pustaka

Peneliti ini menggunakan 10 *literature review* yang memiliki permasalahan yang berbeda, hal ini bertujuan untuk menciptakan pengembangan sektor pariwisata yang lebih baik, khususnya pengembangan terhadap sektor pariwisata Kabupaten Sleman. *Literature review* sebagai berikut:

Tabel 1 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1	(Setyaningrum Nugraheni et al., 2020)	Penerapan <i>Cleanliness, Health, Safety And Environment</i> (CHSE) <i>Homestay</i> Untuk Keselamatan Wisatawan	Temuan dalam kajian ini adalah CHSE dibuat berdasarkan keputusan menteri kesehatan tentang protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid-19. Ketiadaan informasi dari pengurus <i>homestay</i> tentang CHSE menjadi dasar persyaratan untuk persiapan pelaksanaan CHSE. Gerakan administrasi kelompok masyarakat ini merupakan kerjasama kelompok administrasi STIEPARI Semarang dengan Dinas

			<p>Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pematang dan diselesaikan secara terorganisir dalam tiga tahap tindakan, dimulai dengan studi banding dan pemahaman CHSE hingga homestay. daerah eksekutif, diikuti oleh latihan percakapan pusat dan ditutup dengan persiapan CHSE.</p>
2	(Arlinda et al., 2021)	<p>Pengaruh Pelaksanaan Program Adaptasi CHSE (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Lingkungan) Terhadap Kepuasan Tamu Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Kediri Pada Era <i>New</i></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa penerapan program adaptasi CHSE yang baik dapat memaksimalkan kepuasan pengunjung kemudian mempengaruhi perkembangan pariwisata dan industri kreatif, sehingga kepuasan pengunjung berperan dalam hubungan antara implementasi CHSE program penyesuaian dan pengembangan</p>

		<p><i>Normal</i> Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Ekonomi Pariwisata Dan Industri Kreatif</p>	<p>ekonomi pariwisata dan industri kreatif.</p>
3	(Lumanauw, 2020)	<p>Edukasi Dan Implementasi Protokol Clean Health Safety Environment Melalui <i>We Love Bali</i> KEMENPAREKFR AF Pada Program 10 Sanur – Nusa Penida –Nusa Lembongan Sanur – Sanur</p>	<p>temuan pada penelitian ini menjelaskan bahwa peran sektor pariwisata Hasil memegang kendali kuat pada sektor kesiapan daya tarik wisata (DTW) dengan dikombinasikannya program KEMENPAREKRAF yaitu CHSE akan menciptakan sebuah trobosan baru daalam menjalankan protokol kesehatan covid-19, tentunya dari hasil penelitian ini menjabarkan bagaimana suatu pelaksanaan edukasi dan implementasi CHSE</p>

			<p>bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada wisatawan untuk dapat menyambut program pemerintah setempat yaitu <i>We Love Bali</i> (WLB), pemerintah setempat harus dapat memberikan perhatian khusus kepada pengelola tempat dan wisatawan untuk bisa berjalan secara beriringan agar penerapan CHSE melalui WLB bisa berjalan optimal, disisi lain memang dari berjalannya program ini masih terdapat titik kelamahan pada penerapannya, terutama pada kesadaran konsumen untuk bisa dapat menumbuhkan pola pikir wisatawan dengan memberikan edukasi terkait CHSE</p>
4	(Lim et al., 2021)	Meningkatkan Kualitas Pengalaman	Masyarakat lebih berhati-hati dalam mengintegrasikan

		<p>Wisatawan Dengan Pelayan Kepemanduan Dan Penerapan Protkol Kesehatan Di Desa Wisata Nglangeran</p>	<p>penggunaan protokol kesehatan tanpa membedakan wisatawan lokal, baik kota maupun pulau, maupun wisatawan asing. Selain itu, diharapkan masyarakat tidak hanya mampu mentaati dan menerapkan peraturan pelaksanaan protokol kesehatan, tetapi juga mampu menciptakan konsep kegiatan dan tempat yang disesuaikan dengan pelaksanaan protokol kesehatan. namun dapat memiliki pengalaman yang lebih memuaskan sehingga wisatawan ingin berkunjung kembali karena mendapatkan pengalaman berwisata di Desa Wisata Nglanggeran. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan tur museum yang menarik sehingga pengunjung dapat memiliki pengalaman mereka sendiri.</p>
--	--	---	--

5.	(Polonia & Ravi, 2021)	Pengembangan SDM Pokdarwis Desa Wisata Sungai Awan Kiri melalui Clean, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE)	Pada program CHSE ini merupakan program apda protokol kesehatan yang baru di terapkan di seluruh destinasi wisata, penulis menyatakan bahwa SDm pokdarwis mengikuti kompetensi CHSE untuk bias di terapkan pada desa wisata sungai awan, hal ini sangat berguna bagi masyarakat sekitar dengan adanya peniingkatan dari kompetensi setiap indiviu Pokdarwis di desa tersebut, para peserta yang hadir pada kompetensi tersebut meyakini CHSE merupakan solusi dari suatu peramalahan selama ini untuk dapat bangkit bersama.
6.	(Setyaningrum Nugraheni et al., 2020)	<i>Penerapan Cleanliness, Heealth, Safety And</i>	Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi dari penerapan CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety, and</i>

		<p><i>Environment</i> (CHSE) <i>Homestay</i> Untuk Keselamatan Wisatawan</p>	<p><i>Environment</i> pada pengelola pengelola <i>homestay</i> yang masih minim pengetahuan dalam menjalankan penerapan dari program tersebut. Penelitian ini dilakukan secara kolaborasi dengan para tim pengabdian STIEPARI Semarang dengan Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Pemalang dengan dilakukan secara sistematis dengan berbagai tahapan dasar sebagai peneliatian mereka. Empat desa yang menjadi sorot pandang dalam penelitian ini adalah desa wisata yang menjadi titik focus untuk mengkomper dari beberapa <i>home stay</i> yang berjalan di masa pandemi, adanya <i>collaborative</i> antara pihak Lembaga pemerintah dalam pengelolaan pariwisata mampu menghadirkan suatu</p>
--	--	--	--

			inovasi yang bisa menjadi acuan dalam memberikan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 (Setyaningrum Nugraheni et al., 2020).
7.	(ANITA, 2020)	Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Industri Pariwisata Di Provinsi Sumatera Utara.	Berdasarkan pembahasan yang dibuat oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Sumatra Utara memiliki potensi yang melimpah ditinjau dengan peningkatan yang kumulatif secara signifikan, maka dengan itu perlu adanya pengembangan secara teknologi dalam menunjang dari kegiatan pariwisata agar informasi yang diperoleh wisatawan tersebar secara masif demi meningkatkan pendapatan melalui usaha di bidang pariwisata, hal ini perlu didukungnya <i>Colaborative Governance</i> dengan mengkaitkan Pemerintah daerah

			<p>setempat seperti Dinas pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan sektor ekonomi dan jumlah pengunjung wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja dengan beberapa hasil dari penulis yang diambil sebelumnya, poin fokus yang didapat dari penelitian ini yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pariwisata dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi2. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pariwisata. Faktor penunjang juga perlu diperhatikan dalam permintaan pariwisata seperti nilai tukar dan indeks harga konsumen <p>(Pariwisata et al., 2020)</p>
--	--	--	---

8.	(Tobias & Kristianto, 2021)	Strategi Pengembangan Pariwisata Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Pandemi Covid-19	Setelah pemerintah pada masa covid-19 yang sedang gencar-gencarnya mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dengan maksud tujuan melarang negara lain yang ingin berkunjung ke Indonesia dengan maksud tujuan menekan angka laju pertumbuhan covid 19, sehingga pada penelitian ini mengakibatkan beberapa sektor pariwisata mengalami kerugian yang mengakibatkan beberapa pasar lokal yang menjual cendramata mengalami terjun bebas pada omset penjualan, sehingga berbagai strategi pada Pemda setempat memberikan manuver, agar para umkm di sektor pariwisata bisa bertahan hingga situasi pandemi dapat
----	-----------------------------	---	---

			terkendali (Tobias & Kristianto, 2021).
9.	(Ani & Vivian Octariana, 2021)	Efektivitas Penerapan CHSE (<i>Clean, Health, Safety & Environment</i>) Pada Hotel Katagori Bintang 3 (Tiga) di Kota Depok	Hasil dari penelitian ini menunjukkan data pada pengunjung pariwisata agar dapat sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, yaitu CHSE. Kota Depok memang dalam beberapa hari terakhir menjadi bahan kajian para peneliti terhadap covid-19, diantara lain karena kota Depok merupakan kota Metropolitan JABODETABEK, hal ini menjadi perhatian khusus dalam menerapkan PROKES yang ketat. Hasil dari penelitian ini rata-rata seluruh variabel kuesioner CHSE(X) pada hotel bintang 3 di Depok adalah 72% sehingga dapat diklasifikasikan dalam kategori baik. Dapat dilihat pada semua indikator

			<p>prediktif bahwa indikator terendah terdapat pada saat cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum dan sesudah masuk restoran, hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan tempat cuci tangan di area restoran (Ani & Vivian Octariana, 2021).</p>
10	(Supeno et al., 2021)	<p>Program <i>THE CHSE</i> (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan) untuk Kehidupan Normal Baru di Tjili Bena Curated Artote</p>	<p>Hasil temuan penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata dalam upaya peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan telah di optimalkan oleh pemerintah daerah dengan program kerja dan strategi perencanaan berdasarkan otonomi daerahnya masing-masing. Hampir semua sektor industri pariwisata Bali berusaha menerapkan 4.444 program</p>

			<p>sertifikasi CHSE. Tijili Bena Curated Artotel melakukan berbagai hal untuk mendukung program CHSE saat ini. Di Tijili Bena Curated Artotel, program CHSE dipersiapkan dengan baik dan hotel telah mendapatkan sertifikasi untuk program ini dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bali, dan program ini sendiri sangat membantu dalam meningkatkan penjualan hotel. serta menjamin keamanan para tamu yang menginap untuk dapat mengunjungi hotelnya(Supeno et al., 2021).</p>
--	--	--	--

Berdasarkan pada hasil kajian literatur penelitian – penelitian terdahulu lebih banyak mengulas penerapan CHSE di sektor pariwisata termasuk *Homestay* dan perhotelan. Namun disisi lain ada juga yang membahas pada ekonomi kreatif. Secara umum CHSE ini memberikan pengaruh yang cukup, tetapi belum signifikan.

Oleh karena itu peneliti disini akan mencoba meneliti mengenai penerapan CHSE pada destinasi pariwisata di Kabupaten Sleman. Dalam topik penelitian ini, peneliti akan mencari bagaimana pengelola destinasi pariwisata dalam meminimalisir penyebaran covid-19 melalui program CHSE mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga, evaluasi. Pada Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengisi kekosongan pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, semoga penelitian ini mampu menjadikan wawasan untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Pariwisata

Mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang berbunyi tentang kepariwisataan dapat menghadirkan batasan yang jelas mengenai arti dari wisata/pariwisata, dengan definisi yaitu kegiatan perjalanan yang didasari atas kemauan seseorang atau kelompok dengan mensinggahi tempat-tempat tertentu dengan maksud dan tujuan hanya sekedar rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari karakteristik dari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu yang temporer. Maka dengan beragamnya wisatawan dari pelosok negeri Cohen menerangkan wisatawan berdasarkan kesamaan dan kesamaan ruang yang akan di kunjungi, serta tingkat dari asosiasi kunjungan. Berdasarkan kesimpulan yang sudah di teliti terdahulu, Cohen mengelompokan wisatawan menjadi beberapa bagian yaitu:

- A. *Drifter*, khususnya para wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali tidak mereka ketahui, yang melakukan perjalanan dalam jumlah kecil.

- B. *Explorer*, khususnya para wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanan mereka sendiri, tidak memiliki keinginan untuk mengikuti cara-cara wisatawan biasa tetapi mencari hal-hal yang tidak biasa. Wisatawan tersebut akan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan bertopang pada pedoman lingkungan dan tingkat kolaborasi dengan jaringan terdekat juga tinggi.
- C. *Individual Mass Tourist*, khususnya wisatawan yang mempresentasikan rencana perjalanan mereka kepada para pengguna jasa agen perjalanan, dan mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal.
- D. *Organized Mass Tourist*, khususnya wisatawan yang hanya ingin mengunjungi tempat-tempat wisata ramai dikunjungi oleh wisatawan lain sekarang, dengan berbagai fasilitas yang dihadirkan misalnya yang bisa ditemui di tempat tinggalnya dan perjalanannya yang selalu dipandu oleh seorang pengawal lokal/ penyedia jasa liburan.

Wisatawan menurut Smith yaitu dengan menggolongkan wisatawan menjadi tujuh yaitu:

- A. *Explorer*, khususnya wisatawan yang mencari wisata baru dan menjalin hubungan serius dengan kearifan lokal sekitar dan akan menerima apa adanya yang di suguhkan oleh warga lokal, tentunya dengan menghargai adat dan istiadat setempat.

- B. *Elite*, khususnya wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata yang belum diketahui, namun dengan rencana yang sudah dipikirkan matang-matang terlebih dahulu dandilakukan dengan jumlah perjalanan yang kecil.
- C. *Off-Beat*, terutama wisatawan yang mencari tempat wisata sendiri dan tidak punya keinginan untuk pergi ke tempat-tempat yang saat ini ramai dikunjungi.
- D. *Unusual*, terutama wisatawan yang dalam perjalanannya sering juga melakukan olahraga ekstra, mengunjungi tempat-tempat baru atau melakukan olahraga yang sampai taraf tertentu berbahaya.
- E. *Incipient Mass*, khususnya wisatawan yang melakukan perjalanan sendiri atau dalam kumpul-kumpul kecil, mencari lokasi wisata yang memiliki fasilitas standar namun sekaligus menawarkan keaslian.
- F. *Mass*, khususnya wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata dengan dihadirkannya fasilitas yang sama persis seperti dari tempat tinggal wisatawan tersebut atau dengan kata lain berpergian ketempat tujuan wisata dengan *environmental bubble* yang menghantarkan untuk dapat bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat lokal kecil. Hal ini tidak berlaku bagi mereka yang secara langsung menggunakan jasa/agen pariwisata.
- G. *Charter*, untuk wisatawan tertentu yang melakukan perjalanan ke tujuan wisata dengan ciri yang sama seperti di lingkungan tempat

tinggalnya, wisatawan ini biasanya bertujuan hanya untuk bersenang senang dengan jumlah kelompok besar dan dengan menghadirkan beberapa fasilitas yang berstandar internasional.

Definisi pariwisata menurut beberapa ahli, sebagai berikut :

Oka A. Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan wisata yang dilakukan untuk beberapa waktu yang dilakukan mulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya, dengan harapan tidak untuk kegiatan usaha atau menghasilkan uang di tempat yang dikunjungi, tetapi hanya untuk menikmati dari perjalanan tersebut dengan tujuan utama yaitu bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi hajat yang beraneka ragam.

Menurut J.Christoper Holloway Pariwisata adalah kepergian orang-orang dalam waktu sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan diluar tempat tinggal dan bekerja sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada ditempat-tempat tujuan tersebut.

Menurut Robert Mc. Intosh dan Shashikant Gupta *Tourism* adalah perpaduan antara gejala dan koneksi yang muncul dari kerja sama para wisatawan, instansi, pemerintah, dan tuan rumah selama waktu yang dihabiskan untuk menarik dan melayani para wisatawan dan tamu-tamu lainnya. pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh daerah setempat, pengelola, dan pemda setempat. terlebih lagi, menghidupkan area efisiensi lainnya.

Berikut adalah Isu-isu Strategis Pariwisata Daerah:

A. Promosi Pariwisata

Promosi pariwisata bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul, promosi pariwisata dapat dilakukan dengan cara, memasang iklan di TV, radio, internet, baliho, media sosial dan lain-lain.

B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Birokrasi

Pemerintah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada tentunya akan berimbas kepada pembuatan kebijakan atau program-program menjadi lebih tepat guna mencapai hasil yang maksimal.

C. Pemberdayaan masyarakat

Dengan memberdayakan masyarakat akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri, dengan pemberdayaan masyarakat akan diberi pelatihan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

1.6.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep dasar dalam sebuah negara dalam bentuk regulations dalam memecahkan suatu permasalahan publik (F. Utami, 2020) pandangan lain menurut para ahli yaitu salah satunya disebutkan oleh Carrl J. Friedrick, menjelaskan bahwa kebijakan merupakan sebuah rangkaian yang memuat sebuah tindakan yang dapat diusulkan oleh individu, kelompok, maupun oleh lembaga pemerintahan dalam satu cakupan untuk menciptakan suatu tujuan

tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Pernyataan yang di utarakan dari seorang ahli tersebut hadirnya kebijakan merupakan suatu solusi yang menghadirkan pemerintah dalam mengatasi problematika yang sering terjadi di lapangan. Kebijakan pemerintah sebagai bentuk tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dalam pemikirannya yang mengatakan tentang kebijakan publik, maka dapat di simpulkan kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Herdiana, 2018), dalam hal ini pemerintah bukan hanya menjalankan tugasnya saja dengan mensukseskan program yang dibuat namun dalam kebijakan publik pemerintah untuk tidak dapat merespon permasalahan yang ada juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik, dengan artian untuk dapat mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang di cita citakan bersama. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan untuk menimbulkan hasil (*output*), dampak (*outcomes*) dan manfaat (*benefit*), serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Menurut Bridgeman & davis membagi kebijakan menjadi tiga bagian yang saling berkesinambungan yaitu objektif, tindakan legal atau sah secara hukum dan yang terakhir hipotesis.

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik sebagai tujuan ialah membicarakan persoalan perolehan, pencapaian, keberhasilan yang menyangkut masalah publik. Maknanya ialah bahwa kebijakan dibuat sebagai bentuk responsi terhadap permasalahan publik dalam upaya mengatasi permasalahan pada objek yang ingin dicapai.

2. Kebijakan publik sebagai perilaku yang legal

Pilihan tindakan kebijakan bersifat legal yang didasari pada suatu otoritas dari sebuah sistem pemerintahan. Pada konteks ini artinya kebijakan yang dibuat atas dasar tugas, wewenang dalam rangka membuat sebuah perencanaan, rancangan undang-undang atau aturan pemerintah maupun dalam rangka perencanaan anggaran yang di bahas dan di pertimbangkan di sebuah parlemen.

3. Kebijakan Publik Sebagai Hipotesis

Kebijakan publik sebagai hipotesis dimaknai bahwa sebuah kebijakan sebagai melalui tahapan dasar teori, model dan hipotesa mengenai sebab dan akibat dari suatu kejadian isu publik. Kebijakan ini berorientasi pada asumsi-asumsi perilaku masyarakat, kebijakan ini mendorong seseorang untuk menciptakan suatu gerakan.

1.6.3. Implementasi Kebijakan

Pemahaman pada implementasi dapat dikaitkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang harus berorientasikan pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat pada umumnya. Kebijakan bisa dikatakan berhasil jika kemanfaatannya telah dijalankan terhadap kebijakan yang sudah di terapkan, implementasi merupakan kegiatan yang paling utama dalam melakukan semua proses yang sedang berlangsung dengan didasari pada peraturan dan kebijakan.

Menurut Agostino (2010:154) dalam (Justifay Manan Putra, 2017), penelitian terdahulu menjabarkan bahwasannya terdapat enam variable implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja terdapat sebagai berikut:

- 1) Ukuran & Tujuan Kebijakan. Dalam ukuran ini terdapat sebuah kinerja pada imlementasi kebijakan sehingga ukuran dan kebijakan dapat terukur dari keberhasilannya, melihat dari tujuan dari kebijakan tersebut memang relistis dengan berkembangnya kontribusi penting yang dibuat masyarakat untuk pengembangan (sosio-kultur) yang berada di level pelaksana kebijakan.
- 2) Sumberdaya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga dipengaruhi pada sumber daya yang tersedia, khususnya terdapat sumber daya manusia sebagai agen dari pelaksana sebuah jalannya roda kebijakan.
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana. Karakter agen pelaksana tertuju pada fokus dan kinerja dari agen pelaksana tersebut. Karakter ini mencakup

pada orientasi organisasi formal dan organisasi informal yang melibatkan pada pengimplementasian kebijakan (publik) yang dalam penerapannya banyak dipengaruhi melalui para agen pelaksananya. Selain dari itu cakupan implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan untuk dapat menentukan agen pelaksana. Maka semakin kompleks cakupan implementasi kebijakan tersebut, maka dapat disimpulkan akan semakin besar juga agen yang dilibatkan.

- 4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana. Sikap dari penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh para penggerak pelaksana (pelaksana kegiatan) akan dapat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya pada kinerja dari implementasi kebijakan publik itu sendiri. Hal ini bisa di lihat pada agen pelaksana kebijakan yang mengenal betul pada pada persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
- 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi memang sangat penting sebagai strategi yang ampuh dalam berjalannya mekanisme implementasi kebijakan publik. Tolak ukur yang di dapat dari adanya sebuah koordinasi komunikasi yang bagus, dilihat dari bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses implementasi bisa mengutarakan pernyataannya dari proses yang dijalainnya.
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Berada dilingkungan ekosopol adalah cara lain dari pendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam penelitian terdahulu menjelaskan

bahwasannya Van Metter dan Van Horn mengutarakan pada sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung dari keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan ekosospol yang berjalan tidak kondusif dapat menjadi faktor penghambat dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Penelitian Cleaves (Nofriandi, 2017) menjabarkan dalam penelitiannya “penerapan implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses dari tindakan administrasi dan politik” tentu dalam mewujudkan suatu dari pemikiran kita hingga bukti yang sudah terealisasikan maka perlunya arah untuk menetapkan tujuan implementasi publik yang dapat di realisasikan sebagai hasil dari sebuah terobosan baru pemerintah. Proses dari keseluruhan dalam penetapan kebijakan baru bisa dimulai jikalau tujuan dan sasaran yang bersifat umum telah usai di perinci.

Implementasi juga lebih interaktif dibandingkan proses kebijakan sebelumnya, seperti formulasi dan legitimasi, yang dinilai oleh Federal Program di Oakland, California, Jeffrey L. Pressman dan Aaron B. Wildavsky di Jones. Definisikan implementasi sebagai berikut: “Implementasi dapat dianggap sebagai interaksi antara serangkaian tujuan dan tindakan yang mampu mencapainya, dengan demikian implementasi atau implementasi program telah menjadi jaringan yang tidak terlihat, aplikasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan lain. dalam rantai kausal yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan

dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

1.6.4. Next Normal

Menetapkan protokol kesehatan diberbagai sektor publik, Melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /MENKES/382/2020 telah menerbitkan keputusan protokol kesehatan bagi ruang publik dan pelayanan umum dalam rangka memutus rantai penyebaran dan pengendalian covid-19. Ketetapan yang telah di putuskan dengan Kondisi krisis kesehatan yang masih melanda hingga beberapa tahun terakhir ini menjadikan pola hidup serta pola perilaku menjadi berubah (Damiarti et al., 2019). Beberapa jenis penyakit yang diakibatkan virus corona di ketahui dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, penularan yang disebabkan oleh manusia ini mulai dari batuk, pilek hingga pada tingkatan yang lebih tinggi seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severse Acute Respiratory Syndrome (SARS). Berbagai upaya yang telah pemerintah lakukan dalam penanganan dari adanya pandemic ini, memunculkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020. Tidak hanya dalam membuat regulasi saja namun pemerintah dalam tindakanya tersebut menjadi acuan protokol kesehatan pada seluruh lokasi yang menjadi daya tarik wisata atau destinasi wisata.

The Next Normal adalah istilah yang diciptakan oleh McKinsey. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ada sebelum dan sesudah; periode sebelum covid-19

dan new normal yang akan muncul di era pasca-viral, yaitu *Next Normal* (Walkme, 2021).

McKinsey (2021) menyarankan agar perusahaan kembali lebih optimal dan kuat, sehingga mereka harus menata ulang pada model bisnis mereka dengan berfokus pada empat bidang strategis:

1. Memulihkan pendapatan operasi
2. Pembangunan kembali
3. Pengoptimalan kinerja organisasi
4. Mempercepat era digitalisasi

Menurut pendiri dan Presiden MarkPlus, Inc. Hermawan Kartajaya mencoba menjelaskan tentang adanya istilah pada *next normal*, ujarnya bisa dikatakan *next normal* ketika selesainya masa *work form home* (WFH) dan kembalinya pada aktivitas ekonomi, PPKM dilonggarkan dan pegawai dapat masuk kantor (Indonesia new normal id, 2021), hal ini yang merupakan tolak ukur dari adanya *next normal*. Melihat sudut pandang Hermawan dalam konteks pandemi covid-19, sebelum terjadinya pandemi, perubahan yang terjadi selama pandemi dan perubahan baru yang *sustainable*. Dapat dijabarkan secara umum yaitu terdiri dari tiga fase perubahan yang terjadi, yaitu *previous normal*, *new normal*, dan *next normal*. Pada masa pandemic covid-19 yang sangat luas dalam penyebarannya, secara tidak langsung kita memasuki fase *new normal* yang dimana pada fase ini kita di benturkan dengan kegiatan yang serba online yang menjadi rutinitas baru, setelah pandemi ini berakhir kita memasuki masa dimana kondisi normal pada ketidaknormalan atau *next normal*, hingga saat ini kita sudah terbiasa melihatnya

sabagai sesuatu yang umum dan efektif. Teknologi digital dapat membuat masyarakat yang sebelumnya tidak terbiasa menjadi terbiasa dan memaksakan diri sesuai keadaan demi memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan berbagai hal secara digital, mulai dari transaksi hingga belajar menggunakan teknologi secara digital.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan dengan kata lain berpindah dari satu tempat untuk dapat memenuhi hajat dari setiap individu, dengan tujuan kegiatan dari perjalanan tersebut untuk dapat menikmati objek dan daya tarik wisata dengan definisi orang yang melakukan perjalanan wisata disebut dengan wisatawan, atas dasar pengertian diatas melihat dari kaca mata saat ini pariwisata merupakan rangkaian dari perjalanan yang sangat sistematis atau terencana baik dilakukan individu maupun berkelompok dengan tujuan untuk mendapatkan rasa kepuasan dan kesenangan batin.

1.7.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan perwujudan dari sebagian rangkaian dengan konsep dan asas yang mendasar dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Atas dasar hal tersebut jika dilihat dari kaca mata pemerintahan bahwa kebijakan merupakan integrasi antara unit pemerintah dengan lingkungannya Agustini (2008:6) dalam (Leo Agustino, 2017) dengan kata lain bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang terlaksana atau tidak terlaksana yang di lakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada visi tertentu demi

menyelesaikan persoalan yang ada pada masalah- masalah publik demi kepentingan khalayak orang banyak.

1.7.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat di artikan sebagai dari proses umum tindakan yang bersifat administratif yang dapat di ambil sudut pandang dari peneliti terdahulu pada tingkatan dari program tersebut, tahapan dai implementasi ini baru bisa dikatakan mulai apabila maksud dan tujuan telah di sepakati atau di tetapkan, visi kegiatan program telah tersusun dan dari segi materi yang telah memadai siap untuk di targetkan guna mencapai titik sasaran yang tepat. Implmentasi kebijakan yang tepat perlu dilakukan dengan pemikiran yang matang karena dengan visi yang optimal dalam penerapannya berbagai faktor yang mendukung keberhasilan suatu program menjadikan hal tersebut efektif.

1.7.4. Next Normal

Next normal dapat diartikan sebagai pola hidup baru yang dimana pada masa ini dianggap normal pada ketidaknormalan, hingga saat ini kita sudah terbiasa melihatnya sabagai sesuatu yang umum dan efektif. Termasuk dalam teknologi digital dapat membuat masyarakat yang sebelumnya tidak terbiasa menjadi terbiasa dan memaksakan diri sesuai keadaan demi memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan barbagai hal secara digital, mulai dari transaksi hingga belajar menggunakan teknologi secara digital.

1.1. Definisi Oprasional

Definisi operasional merupakan bentuk artian pada sifat-sifat yang diamati untuk dapat didefinisikan sebaagai tolak ukur dari penelitian. Dengan demikian definisi operasional akan memunculkan dari pengambilan data yang tepat untuk dapat diterapkan atau mengacu pada variable yang digunakan. Pada penelitian kali ini membahas tentang implementasi program dari adanya penerapan CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment Sustainability* dalam meminimalisir penyebaran virus covid-19 di sektor pariwisata, yang di ukur dengan variable imlementasi kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.3 Definisi Operasional

No.	Variable	Indikator	Parameter
1	Implementasi Kebijakan	Ukuran dan Sasaran kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Kriteria penerima CHSE• Dampak Penerapan
		Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas Sumber Daya Manusia• Sumber Daya Fasilitas• Sumberdaya Anggaran
		Karakteristik Agen/Badan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pariwisata Sleman• Pengelola Destinasi Wisata
		Disposisi/Sikap birokrasi & pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Kognisi Pemahaman Tentang Kebijakan• Tanggapan Penerimaan

			<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas Tanggapan
		Komunikasi dan bentuk kordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi • Kejelasan • Konsistensi

1.9. Metodologi penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif menurut Bogdan & Taylor sebagaimana dikutip dalam (Dr.farida Nugrahani, 2017) adalah penelitian kualitatif sebagai panduan yang ingin di teliti untuk dapat memperoleh data data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari subjek dan fenomena yang di teliti untuk mendapatkan data yang ilmiah. Sedangkan menurut (Madekhan, 2019) menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan sebuah upaya yang digunakan untuk mengintreprestasikan realitas kehidupan berdasarkan pada pemahaman dari sang peneliti. Metode kualitatif ini digunakan untuk mencari dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat melalui pengumpulan data, analisis kemudian diinterprestasikan.

1.9.2. Jenis Data

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan dua jenis data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang di peroleh merupakan hasil informasi yang didapatkan dan di hubuungkan dengan penelitian yang diangkat.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara eksklusif dari subjek utama atau bisa dikatakan orang yang terlibat secara langsung (Moha & sudrajat, 2019). Sumber dari data primer bisa didapatkan melalui wawancara secara individu kepada narasumber yang sesuai dengan tema penelitian yang nantinya menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Tabel 1.4 Data Primer

No	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Pemkab Sleman Dalam Memonitoring Evaluasi CHSE Di ODTW dan jumlah pengunjung wisatawan DIY	Dinas Pariwisata Sleman	Wawancara
2.	Proses Implementasi CHSE di ODTW Tebing Breksi	Pengelola ODTW Tebing Breksi	Wawancara
3.	Proses Implementasi CHSE di ODTW Ratu Boko	Pengelola ODTW Ratu Boko	Wawancara
4.	Ketersediaan fasilitas CHSE Ratu Boko dan jumlah pengunjung	Pengelola ODTW Ratu Boko	Wawancara
5.	Ketersediaan fasilitas CHSE Tebing Breksi dan jumlah pengunjung	Pengelola ODTW Tebing Breksi	Wawancara
6.	Tanggapan terkait kebijakan Implementasi CHSE di ODTW	Wistawan Nusantara	Wawancara

7.	Pemahaman pegawai Tebing Breksi dan Ratu Boko Terhadap Implementasi CHSE	Pegawai/Pengelola	Wawancara
----	--	-------------------	-----------

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, atau dengan arti lain data yang diperoleh melalui *platform* media sosial, situs web, dan lain-lain (Pratiwi, 2017). Data sekunder disini dihadirkan untuk mendukung data dari data primer sesuai dengan pokok permasalahan yang di bawa peneliti.

Tabel 1.5 Data Sekunder

No	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Jumlah Pariwisata Sleman	Dinas Pariwisata Sleman	Dokumentasi
2.	Jumlah Penerima CHSE Di Kabupaten Sleman	Dinas pariwisata Sleman	Dokumentasi
3.	Data pengelola ODTW Ratu Boko	PT. TWC (Persero)	Dokumentasi
4.	Data Pengelola ODTW Tebing Breksi	Pengelola Tebing Breksi	Dokumentasi

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam suatu penelitian dalam memperoleh informasi yang didapatkan untuk dijadikan sebagai data dalam penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan

metode penelitian kualitatif. Dimana proses pencarian data bisa didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam proses penelitian kualitatif, observasi sangat penting untuk memahami suatu fenomena yang akan diteliti berlandaskan pada sumber informasi yang akan dijadikan sebagai sumber data. Observasi bisa dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian, untuk mengamati lingkungan lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah proses obrolan dua arah antara peneliti dengan narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proses penggalian informasi mengenai fenomena yang dijadikan sebagai topik penelitian. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan informasi yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam mendukung validitas penelitiannya.

Tabel 1.5
Daftar Narasumber

No	Informan	Jabatan	Uraian Data
1.	Dewi Setyowati, ST M,Eng	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dan Ekonomi	Sasaran kebijakan Pemkab terhadap CHSE

2.	Prima	Reach Management Governance and Compliance Manager PT.TWC dalam Unit Ratu Boko	Proses berjalannya implementasi CHSE pada ODTW Ratu Boko
3.	Halim	Humas Tebing breksi	Proses berjalannya implementasi CHSE pada ODTW Tebing Breksi
4.	Ariwibowo	Pegawai Seksi Keamanan	Keselarasn penyampaian informasi antara pegawai dengan pimpinan
5.	Arianto	Pegawai Seksi Keamanan	Keselarasn penyampaian informasi antara pegawai dengan pimpinan
6.	Fauzan, Alif	Wisatawan Tebing breksi	Perspektif wistawan nusantara terhadap implementasi CHSE
7.	Yuni, Yuli	Wisatawan Ratu Boko	Perspektif wistawan nusantara terhadap implementasi CHSE

3. Dokumentasi

Adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif seperti mengumpulkan gambar dan surat-surat atau dokumen penting. Selain sebagai proses pembuktian penelitian dilapangan, dokumentasi juga berperan dalam memberikan gambaran umum terkait kondisi yang terjadi dilokasi penelitian.

1.9.4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian kali ini dilakukan di destinasi wisata Kabupaten Sleman yang sudah menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE sebagai tolak ukur dari adanya proses dan dampak program tersebut, dengan pertimbangan Kabupaten Sleman saat ini menjadi percontohan serta terbanyak di Provinsi D.I.Y, dari data yang di peroleh pada per-September 2021 saat ini sudah mendapatkan sertifikasi CHSE sebanyak 15 destinasi wisata dari 146 objek wisata yang belum terverifikasi adanya penerapan CHSE ini. Oleh hal itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana proses penerapan dari adanya pelaksanaan CHSE ini kepada pengelola objek wisata, wisatawan, dan Dinas Pariwisata. Dalam meminimalisir penyebaran virus covid-19.

1.9.5. Unit Analisa Data

Melihat penjelasan yang diutarakan diatas maka unit analisa pada penelitian ini yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, pengelola wisata, dan beberapa wisatawan.

1.9.6. Teknik Analisa Data

Dalam penyusunannya peneliti menggunakan tiga tahapan dalam menganalisis data yaitu data reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk lebih rinci dalam penarikan data tersebut akan di paparkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data disini dimaksud untuk mensesederhanakan dan menitik fokuskan data-data yang telah di dapat sesuai dengan fokus pada yang di teliti oleh peneliti. Reduksi data dilakukan dengan cara

merangkum, memilah serta meorientasikan pada satu tujuan agar penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan lebih mudah di cerna oleh pembaca.

2. Penyajian Data

Selanjutnya setelah melakukan dari reduksi data yaitu masuk kedalam tahapan menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian menggunakan teks naratif dilampirkan dalam bentuk foto atau gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari data yang sudah diperoleh oleh peneliti, maka peneliti memasuki tahapan verifikasi data untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat hipotesis dan bisa mengalami perubahan, maka dari itu apa bila kesimpulan didukung dengan data yang aktual/valid maka kesimpulan tersebut dapat bersifat tetap, sebab itu pada kesimpulan ini dibuat untuk dapat memecahkan rumusan masalah dan sehingga pada penelitian ini dapat optimal dalam pencapaiannya.

